

**Perancangan Mekanisme Insentif Sektor Swasta Untuk Penguatan
Transparansi Aksi Iklim Indonesia**

Inisiatif Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

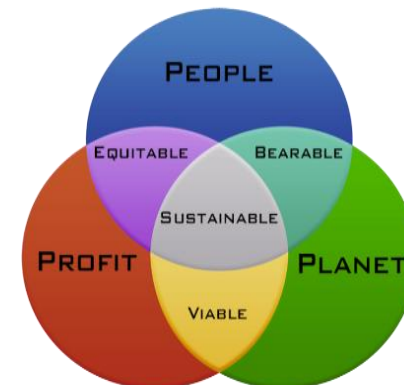
September 2019

Pembangunan Berkelanjutan memerlukan Keuangan Berkelanjutan

- ❖ **Sustainable Development** is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.“ (Brundtland Report, Our Common Future, 1987)
- ❖ **Climate finance** refers to local, national or transnational financing—drawn from public, private and alternative sources of financing—that seeks to support mitigation and adaptation actions that will address climate change. ... Such mobilization of climate finance should represent a progression beyond previous efforts. (UNFCCC)
- ❖ **Sustainable finance** in Indonesia is defined as comprehensive support from the financial service industry to achieve sustainable development resulted from a harmonious relationship between economic, social and environmental interests (SF Roadmap 2015-2019)



No one left behind
(increase private involvement)



Melalui keuangan berkelanjutan Industri Jasa Keuangan diharapkan sebagai bagian solusi

- Kontribusi IJK dalam pembangunan terus meningkat. Dalam 5 tahun terakhir perbankan menyalurkan pembiayaan sekitar Rp600T/tahun, Pasar Modal dan IKNB menyediakan pendanaan sekitar Rp200T/tahun.
- Kontribusi tersebut diharapkan akan lebih meningkat, jika dalam penyediaan pendanaan tersebut disalurkan pada proyek yang memperhatikan aspek tanggungjawab sosial (financial inclusion) dan perlindungan lingkungan hidup. Karena hal ini akan mengurangi:
 - Jumlah penduduk miskin
 - Kerugian ekonomi dan non ekonomi akibat bencana alam yang melibatkan manusia, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan serta akibat polusi air, udara, tanah.
 - Kerusakan infrastruktur yg tidak disiapkan sesuai dengan peta wilayah bencana



Polusi udara,
subsidi BBM



Tanah longsor



Pencemaran air



Infrastruktur
rusak krn gempa



Maret 2018, jumlah penduduk miskin
di Indonesia 25,95 juta orang (9,82 persen)



kebakaran lahan

- Kebijakan OJK tertuang dalam **Roadmap Keuangan Berkelanjutan (2015-2019/tahap I)**
 - **Tujuan Roadmap:**
 - meningkatkan daya tahan dan daya saing IJK agar mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, dan
 - menyediakan sumber pendanaan sesuai kebutuhan (RPJP, RPJMN) dan mendukung SDGs dan CC
 - **Fokus Roadmap Fase I:**
 - pembentukan kerangka dasar pengaturan dan pelaporan,
 - peningkatan pemahaman, pengetahuan dan kompetensi SDM IJK,
 - pemberian insentif dan koordinasi dengan institusi terkait
 - **Implementasi Roadmap Fase I:**
 - **Regulasi.** POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan dan POJK No.60/POJK.04/2017 tentang Green Bond. Implementasi POJK ini secara bertahap 2019-2025.
 - **Sosialisasi.** Sosialisasi ketentuan keuangan berkelanjutan kepada LJK, emiten dan perusahaan publik. Khusus bagi perbankan telah dibuat petunjuk teknis implementasi POJK.
 - **Insentif.** Pemberian award (Sustainable Finance Award) bagi lembaga jasa keuangan, program peningkatan kompetensi SDM IJK melalui program workshop/training tidak berbayar (dalam periode 2015-2019 telah dilaksanakan sebanyak 50 kali melibatkan lebih dari 1000 peserta), dan mengeluarkan panduan/pengenalan investasi berkelanjutan pada energi terbarukan, energi efisiensi, sawit, bangunan hijau, dan pertanian organik.
 - **Inkubasi.** Mendorong leadership di industri jasa keuangan melalui program Pilot Project Sustainable Banking as first movers, di perguruan tinggi melalui pendirian Bali Center for Sustainable Finance Universitas Udayana.
 - **Inovasi.** Mendukung implementasi inovasi pembiayaan dengan skema blended finance untuk mendorong peningkatan pendanaan swasta pada proyek terkait SDGs dan Climate Change.
 - **Koordinasi.** Melakukan koordinasi dan kerjasama di tingkat nasional dan internasional.

- ✓ **Pendanaan:**
 - ✓ Penerbitan green bond/sukuk/sustainable bond total **USD3,9B** (pemerintah USD 3,3B, IJK USD 0,6B).
 - ✓ Komitmen Blended Finance USD 2,46B (6 lembaga pemerintah, 7 development bank, 3 climate funds, 3 philanthropist, 2 equity investor, 3 commercial banks, 1 insurance company) melalui SDG Indonesia One.
 - ✓ 8 bank peserta Pilot Proyek the First Movers mulai melangkah menerapkan ESG (Environmental, Social and Governance) dan membiayai kegiatan usaha berkelanjutan (green project) 2-3% share Sustainable Financing thd Total Financing of Bank, 14% p.a. growth (2015-2018).
- ✓ **Leadership:**
 - ✓ Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) dibentuk pada 2018 oleh First Movers dan diharapkan keanggotaan akan terus bertambah.
 - ✓ Survey Sustainable Banking Network (SBN) pada tahun 2018, menempatkan Indonesia sebagai salah satu yang terdepan dari 35 negara emerging market yang menerapkan keuangan berkelanjutan.

Sebagaimana SDGs dan Climate Change, Keuangan Berkelanjutan adalah **policy driven** untuk mendorong swasta **mau** meningkatkan keterlibatan dalam pendanaan SDGs dan Climate Change oleh karena itu dalam proses transisi **perlu adanya insentif yang tepat dan memadai** bagi LJK maupun proyek yg dibiayai.

Berikut **contoh** keterlibatan regulator SJK dalam memberikan insentif.

- ❑ **Indonesia:** Pelatihan, Award, pengurangan biaya listing green bond, panduan investasi green projects, dan pilot projects.
- ❑ **China:** Pelatihan, Nilai + penilaian tingkat kesehatan bank, kalkulator penghitungan emisi karbon dari green project
- ❑ **Bangladesh:** Kredit liquiditas untuk energi terbarukan, Nilai + penilaian tingkat kesehatan bank, Award, Green label untuk kantor cabang bank
- ❑ **Jepang:** Pengurangan biaya green assurance untuk green projects

Selain dari Otoritas Jasa Keuangan/Bank Sentral, **insentif** lebih banyak diberikan **pemerintah** kepada SDGs/green projects, antara lain dalam bentuk *feed in tariff, tax holiday, tax exemption*, kredit lunak, dll.

- A. Industri Jasa Keuangan (IJK) memerlukan:
1. informasi mengenai kebutuhan pendanaan (nilai proyek, jenis sektor usaha, lokasi) yang sesuai dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Climate Change.
 2. informasi mengenai dan akses terhadap sumber-sumber pendanaan murah dari internasional (*long term*), instrumen *de-risking* agar segera meningkatkan kapasitas penyediaan pendanaan bagi SGD's projects dg harga yg bisa diterima.
 3. dukungan untuk meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan agar dapat menerapkan SF secara optimal, termasuk mendukung IJK dalam menerapkan manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup dan tata kelola (ESG), penyusunan laporan keberlanjutan dan verifikasi proyek.
 4. insentif fiskal dan non fiskal yang tepat sesuai dengan karakteristik masing-masing IJK.
- B. Diperlukan adanya mekanisme yang efektif dan efisien terkait perencanaan, pengukuran, monitoring dan evaluasi kontribusi LJK atas pencapaian SDGs.

TERIMA KASIH

